



IKHTISAR

LAPORAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

SEMESTER I TAHUN 2019



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Juanda No. 8, Sidoarjo

Telp. 031-8531368

Fax. 031-8548153

DAFTAR ISI

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	ii
BAB I INFORMASI UMUM	1
A. Dasar Hukum	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	4
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	5
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	6
A. Audit	6
1. Audit Kinerja	6
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	8
B. Reviu	10
C. Evaluasi	10
1. Evaluasi Kelengkapan SPJ (Pertanggungjawaban Belanja APBD)	10
2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	11
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11
4. Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah.....	12
D. Kegiatan Pengawasan Lainnya	12
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	15
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	15
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	18
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	20
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	32
A. Simpulan	32
B. Hambatan	34
C. Rekomendasi	35

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

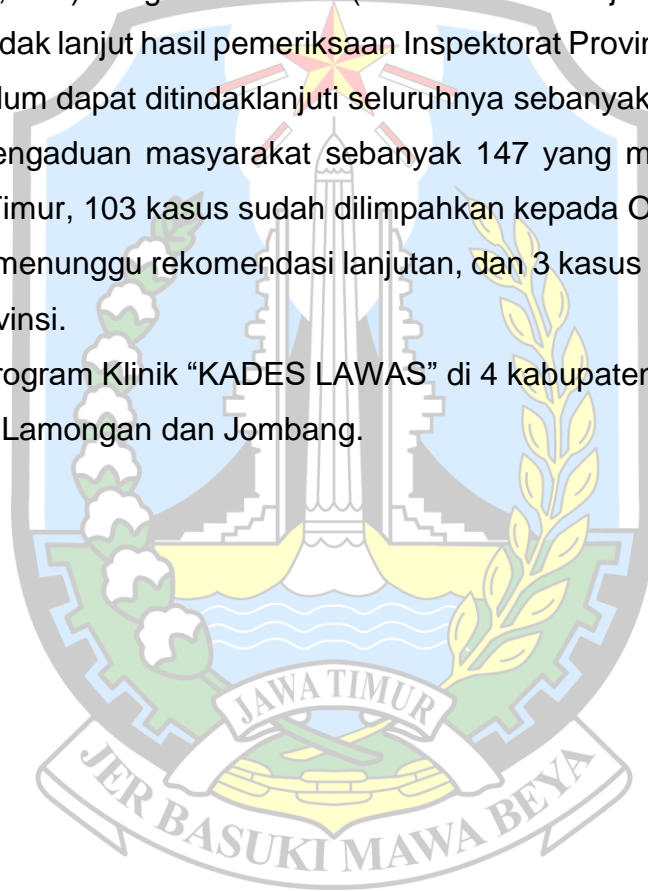
Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintah Pusat dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan pengawasan yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Adapun hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur selama Semester I Tahun 2019 antara lain:

- a. Untuk audit kinerja dengan jenis temuan terbanyak dan rekomendasi dominan yaitu;
 - Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan sub temuan Administrasi sebanyak 107 temuan atau 52% dari jumlah keseluruhan temuan.
 - Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sub temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern sebanyak 38 temuan atau 19% dari jumlah keseluruhan temuan.
 - Temuan 3E (Tidak efektif, efisien dan ekonomis) sebanyak 26 temuan atau 13% dari jumlah keseluruhan temuan.
- b. Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan laporan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Provinsi, pelimpahan hasil APIP, pelimpahan dari KPK serta pemberitaan yang ada di media massa.
- c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum LKPD tersebut diaudit oleh BPK RI.

- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama Semester I Tahun 2019 dilakukan atas 67 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- e. Kegiatan pengawasan lainnya yaitu pelaksanaan sosialisasi EKPPD atas 38 Kab/Kota se-Jawa Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi dan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda.
- f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dari 702 temuan dengan 1403 saran rekomendasi, 1021 rekomendasi (72,77%) dengan status TS (telah selesai), 310 rekomendasi (22,10%) dengan status TB (belum selesai), dan 72 rekomendasi (5,13%) dengan status BT (belum ditindaklanjuti).
- g. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Semester I Tahun 2019, masih belum dapat ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 298 rekomendasi.
- h. Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 147 yang masuk ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, 103 kasus sudah dilimpahkan kepada OPD terkait, 41 kasus diarsipkan dan menunggu rekomendasi lanjutan, dan 3 kasus sudah ditindaklanjuti Inspektorat Provinsi.
- i. Pelaksanaan Program Klinik “KADES LAWAS” di 4 kabupaten, yaitu di Kabupaten Kediri, Jember, Lamongan dan Jombang.





BAB I

INFORMASI UMUM

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan:

- a. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern Gubernur Jawa Timur;

- I. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

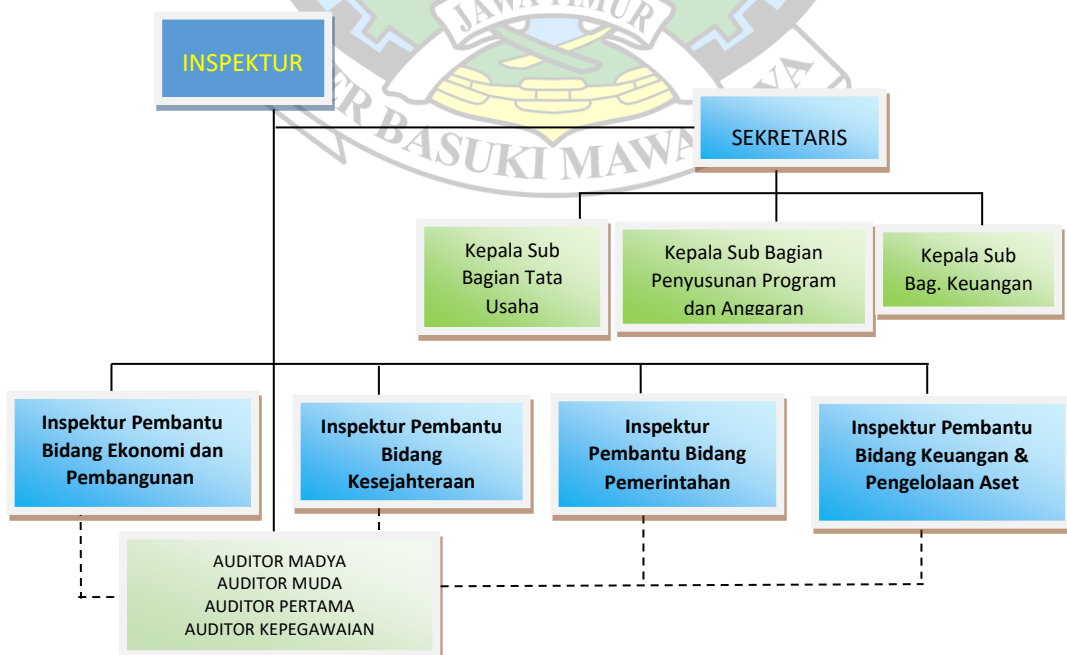
B. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi:

- Perencanaan program pengawasan;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Guna mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, ditetapkan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Inspektur*, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Timur. Inspektur mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di pemerintah Provinsi serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur Kabupaten/Kota se Jawa Timur, berdasarkan Kebijakan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. *Sekretaris*, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat membawahi : (a) Sub Bagian Tata Usaha; (b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan (c) Sub Bagian Keuangan.
3. *Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan*, mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, energi dan sumberdaya mineral, pekerjaan umum bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang, penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.
4. *Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat*, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.
5. *Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan*, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pembinaan kepegawaian dan kinerja aparatur, pendidikan dan latihan, organisasi, pemerintahan umum,

otonomi daerah, pertanahan, kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum, komunikasi dan informatika maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.

6. *Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset*, memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan keuangan, pendapatan, sarana perekonomian dan penyelenggaraan perlengkapan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.
7. *Kelompok Jabatan Fungsional*, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Timur disusun dengan tujuan:

- Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan APIP Pusat dan Daerah;
- Mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP;
- Menjadi bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah daerah kepada Gubernur.

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP ini adalah:

- Terwujudnya koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien;
- Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi;
- Terwujudnya laporan pengawasan APIP kepada Gubernur.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Tabel 1 Program Pengawasan dan Realisasinya

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit : • Ketaatan • Kinerja	108 2	- -	73 2	- -	2 -	-
B	Reviu	2	-	2	-	-	-
C	Evaluasi SPJ Evaluasi RAD PPK Evaluasi SAKIP Pelayanan Publik	54 - - -	- - - -	51 12 4 4	- - - -	21 - - -	-
D	Monitoring	-	-	-	-	-	-
E	Kasus/Khusus/Tujuan Tertentu	-	-	81	-	-	-
	Jumlah	211	-	199	-	23	-

(94,31%)

Keterangan:

OP : Obyek Pengawasan

ADTT : Audit dengan Tujuan Tertentu



BAB II

HASIL PENGAWASAN

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. Audit

1. Audit Kinerja

Kegiatan audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi. Laporan hasil audit kinerja harus mencantumkan kode etik dan standar audit yang digunakan.

Data dan informasi yang disampaikan meliputi:

- a. Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuai Tabel 2 Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester I Tahun 2019.

Tabel 2 Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester I Tahun 2019

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	1.00.00			
1.	Kerugian Negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	0	0	
2.	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	0	0	
3.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	0	0	
4.	Administrasi	1.04.00	107	52	
5.	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0	
	Subtotal Kejadian		107	52	
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00			
1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	3	1	

2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	31	15	
3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	38	19	
	Subtotal Kejadian		72	35	
	Temuan 3 E	3.00.00			
1.	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01.00	4	2	
2.	Ketidakefisienan	3.02.00	7	3	
3.	Ketidakefektifan	3.03.00	15	7	
	Subtotal Kejadian		26	13	
	Jumlah Kejadian		205	100	

Berdasarkan hasil temuan audit kinerja selama Semester I Tahun 2019, dapat diketahui bahwa administrasi masih menjadi masalah utama baik dalam pencatatan maupun pengelolaannya. Temuan yang paling banyak didapati adalah Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan sub administrasi sebanyak 107 kejadian atau sebesar 52% dari total keseluruhan temuan.

- b) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai Tabel 3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester I Tahun 2019

Tabel 3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester I Tahun 2019

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penyetoran ke kas negara / daerah, Kas BUMN/D dan masyarakat	0	0	-
2.	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	0	0	-
3.	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan dan penggantian barang/jasa oleh rekanan	7	2	-
4.	Penghapusan barang milik negara/daerah	2	1	-
5.	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	0	0	-

6.	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi / kelengkapan administrasi	148	50	-
7.	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	11	4	-
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	60	20	-
9.	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	32	11	-
10.	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	11	4	-
11.	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	14	5	-
12.	Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	5	2	-
13.	Pelaksanaan sosialisasi	4	1	-
14.	Lain-lain	4	1	-
	Jumlah	298	100	-

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Tabel 4 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Semester I Tahun 2019

No	Kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jmlh dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jmlh dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jmlh dana OA yang diaudit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Investigatif	-	-	-	-	4	-
B	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan	-	-	-	-	-	-
C	Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian	-	-	-	-	-	-
D	Audit komprehensif	-	-	-	-	2	-

Tabel 5 Jumlah Obyek Audit Investigatif Semester I Tahun 2019

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah obyek audit investigatif	4
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	1.9

Keterangan : 2 Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Walikota dan 2 Pemeriksaan Kasus

Tabel 6 Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik Semester I Tahun 2019

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara	
			Rupiah	Valas
1	2	3	4	5
Kepolisian	-	-	-	-
Kejaksaan	-	-	-	-
KPK	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Tabel 7 Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Semester I Tahun 2019

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara		Keterangan
			Rupiah	Valas	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan ke pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus	-	-	-	-	-

Tabel 8 Kode Etik dan Standar Audit yang Digunakan Semester I Tahun 2019

Kode etik dan standar audit	Dasar peraturan perundang-undangan
1	2
Pedoman Umum Pelaksanaan Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

B. Reviu

Tabel 9 Kode Obyek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Semester I Tahun 2019

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah obyek yang seharusnya direviu	67
Jumlah obyek yang direviu	2
Obyek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	-
Obyek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	-

Keterangan :

67 (enam puluh tujuh) obyek tersebut terdiri dari :

- 1 (satu) LKPD Provinsi Jawa Timur
- 66 (enam puluh enam) LK OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

C. Evaluasi

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 jenis yaitu:

- Evaluasi Kelengkapan SPJ (Pertanggungjawaban Belanja APBD);
- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah.

1. Evaluasi Kelengkapan SPJ (Pertanggungjawaban Belanja APBD)

Evaluasi Kelengkapan SPJ merupakan kegiatan evaluasi atas pertanggungjawaban belanja APBD pada OPD, bertujuan untuk memastikan keberadaan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja serta melakukan evaluasi atas kesesuaian dokumen SPJ dengan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas yang ada, disamping itu juga untuk memberikan saran kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar dalam mempertanggungjawabkan realisasi APBD mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan antara lain untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan serta memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan EKPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Semester 1 Tahun 2019, Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku anggota Tim Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan sosialisasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2019 pada 38 (tiga puluh delapan) LPPD Kab/Kota se-Jawa Timur. Proses selanjutnya yaitu Finalisasi Tahap 1 dan Finalisasi Tahap 2 EKPPD akan dilaksanakan pada Semester 2 Tahun 2019.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dilakukan atas SAKIP Tahun 2018 pada 67 (enam puluh tujuh) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, RSUD dr. Saiful Anwar Malang, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, dan OPD lainnya. Dari 67 OPD yang dievaluasi, 45 OPD atau 67% termasuk dalam kategori A (memuaskan), 12 OPD atau 18% termasuk dalam kategori BB (sangat baik) dan 10 OPD atau 15% termasuk dalam kategori B (baik).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak hanya mengikat kepada OPD, tetapi juga berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Selama tahun 2018, terdapat 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/kota yang hasilnya telah divalidasi oleh Kementerian PAN & RB RI. Terdapat 5 (lima) Kabupaten yang termasuk dalam kategori A, Untuk kategori BB terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota, dan pada kategori B ada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Pada Tahun 2018 dari 38 (tiga puluh delapan) Laporan SAKIP Pemerintah Daerah yang mendapatkan Kategori BB, B dan CC meningkat hal ini disadari

oleh masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pentingnya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

4. Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah

Menindaklanjuti perihal Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPK, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus melakukan input data progress Rencana Aksi yang telah dicantumkan dalam aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) Triwulan III pada website <https://korsupgah.kpk.go.id> untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPK.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Semester I Tahun 2019 atau penilaian tanggal 20 Juni 2019 terhadap 7 area intervensi mendapat progress penilaian KPK sebanyak 49%, progress area intervensi dengan masing-masing bobot sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan Penganggaran APBD sebanyak 55%
- b. Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 30%
- c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 79%
- d. Kapabilitas APIP sebanyak 14%
- e. Manajemen ASN sebanyak 31%
- f. Optimalisasi Pendapatan Daerah sebanyak 70%
- g. Manajemen Aset Daerah sebanyak 72%

Selama Semester I Tahun 2019, Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 12 kabupaten/kota yang memiliki nilai terendah, diantaranya adalah Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuban, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember dan Kota Pasuruan.

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur diantaranya sebagai berikut:

- Melaksanakan Program Klinik “KADES LAWAS” Kawal Desa melalui Pengawasan yang merupakan kegiatan konsultasi bagi perangkat desa

terkait pengelolaan dana desa. Program ini dibuat untuk mengawal dan mengawasi aliran dana desa, selain itu klinik konsultasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD) dan Dana Desa (DD) maupun pengelolaan hibah yang dilaksanakan oleh desa. Klinik Kades Lawas Program ini selama Semester I Tahun 2019 telah dilaksanakan di Kabupaten Jember, Kediri dan Lamongan.

- Memberikan bimbingan/konsultasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Semester I Tahun 2019 dalam bentuk pendampingan dan membuka ruang konsultasi kepada OPD.

Tabel 10 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya Semester I Tahun 2019

No	Kegiatan	Belanja (Rp)		Keluaran			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	Sosialisasi mengenai pengawasan	37.050.000	-	1	-	Kegiatan	-
2	Pendidikan dan pelatihan pengawasan	832.070.000	320.073.400	2	1	Kegiatan	-
3	Pembimbingan dan konsultasi	10.860.550.000	4.861.214.741	12	6	-	-
4	Pengelolaan hasil pengawasan	1.798.593.000	479.139.250	10	3	Kegiatan	Evaluasi TLHP berkala
5	Pemaparan hasil pengawasan	6.600.000	2.825.000	12	4	Kegiatan	-
	Jumlah	13.534.863.000	5.663.252.391				



BAB III
HASIL PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

No	Nama Obyek Pemeriksaan	Semester I Tahun 2019						
		Jumlah		Tingkat Penyelesaian				
		TP	Saran	TS	TB	BT	TT	Jml
1	LKPD TA 2004	15	17	16	0	1	0	17
2	PAD TA 2004 dan 2005 (Agustus 2005) *)	5	6	0	0	6	0	6
3	Kegiatan Operasional Bank Jatim TB 2004 dan 2005	7	10	10	0	0	0	10
4	Pelayanan kesehatan RSUD Dr. Soetomo surabaya TA 2004 dan 2005	16	25	25	0	0	0	25
5	LKPD TA 2005	13	28	25	3	0	0	28
6	Operasional Bank Jatim Ktr. Pusat Cab. Jkt TB 2005 dan 2006	15	26	26	0	0	0	26
7	LKPD TA 2006	12	17	15	2	0	0	17
8	Bantuan Parpol TA 2006	5	5	5	0	0	0	5
9	Dana Perimbangan TA 2006 dan Smt I 2007	4	4	4	0	0	0	4
10	Belanja Infrastruktur TA 2007 Pada Dinas PU Bina Marga	8	16	16	0	0	0	16
11	Belanja Daerah Bidang Kesehatan TA 2007	10	22	22	0	0	0	22
12	Belanja RSUD Soetomo Gedung Diagnostic Centre	9	14	14	0	0	0	14
13	Operasional BPR TB 2006- Juli 2007	13	17	17	0	0	0	17
14	Kegiatan Operasional Bank JATIM TB 2006 dan 2007	22	43	43	0	0	0	43
15	LKPD TA 2007	29	46	43	3	0	0	46
16	PD Panca Wira Usaha TA 2007 dan 2008	20	23	23	0	0	0	23
17	Pemeriksaan BOS (Dinas Pendidikan Provinsi) 2007 dan 2008	31	35	35	0	0	0	35
18	LKPD TA 2008	21	22	21	1	0	0	22
19	Kinerja RSUD Soedono Madiun 2008 dan 2009	5	13	13	0	0	0	13
20	Belanja Infrastruktur 2007-2008	3	9	9	0	0	0	9
21	Jamkesmas TA 2008 dan smt I 2009	4	7	7	0	0	0	7
22	Kegiatan Operasional Bank JATIM TB 2008 dan 2009	12	21	21	0	0	0	21
23	PNPM Prov. Jatim 2008 dan 2009	2	4	3	1	0	0	4
24	LKPD TA 2009	17	33	33	0	0	0	33

No	Nama Obyek Pemeriksaan	Semester I Tahun 2019						
		Jumlah		Tingkat Penyelesaian				
		TP	Saran	TS	TB	BT	TT	Jml
25	Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan 2010	7	13	13	0	0	0	13
26	PT. Jatim Graha Utama Tahun Buku 2009 dan Semester I 2010	10	15	12	3	0	0	15
27	Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar di Malang 2010	13	16	16	0	0	0	16
28	LKPD TA 2010	17	30	30	0	0	0	30
29	Kinerja dr. Soetomo TA 2010 dan 2011	18	35	34	1	0	0	35
30	Kinerja RSU Haji Surabaya TA 2010 dan 2011	16	34	33	1	0	0	34
31	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pengelolaan APBD	7	23	14	8	1	0	23
32	Belanja Daerah TA 2011	5	9	9	0	0	0	9
33	PT. Petrogas Jatim Utama TB 2010 dan Semester I 2011	9	19	18	1	0	0	19
34	Operasional Bank Jatim TB 2010-2011	10	20	20	0	0	0	20
35	BPR TB 2010 dan 2011	6	10	10	0	0	0	10
36	PNPB, RPH, DBH SDA Kehutanan dan Lingkungan Kehutanan TA 2009 s.d 2011 (TW III)	1	1	0	1	0	0	1
37	LKPD TA 2011	13	31	29	2	0	0	31
38	Kinerja Pelayanan Farmasi RSUD Dr. Soedono Madiun TA 2011 dan 2012	15	32	32	0	0	0	32
39	Operasional PT JIM dan Anak Perusahaan TB 2011-2012	5	6	4	2	0	0	6
40	Operasional PT JMU TB 2011-2012	6	8	7	1	0	0	8
41	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 s.d. Semester I 2012	5	8	6	2	0	0	8
42	Upaya Pemerintah dalam Rangka Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan TA 2010, 2011, dan Semester I 2012	10	13	3	10	0	0	13
43	LKPD TA 2012	8	17	15	2	0	0	17
44	Operasional Bank Jatim TA 2012 dan 2013	6	14	12	2	0	0	14
45	Operasional PT. Petrogas Jatim Utama TA 2012 dan 2013 (Semester I)	5	17	10	6	1	0	17
46	Kinerja APIP Provinsi Jawa Timur TA 2012 dan 2013	17	33	8	25	0	0	33
47	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d. Semester I 2013	7	14	8	4	2	0	14

No	Nama Obyek Pemeriksaan	Semester I Tahun 2019						
		Jumlah		Tingkat Penyelesaian				
		TP	Saran	TS	TB	BT	TT	Jml
48	LKPD TA 2013	12	36	16	18	2	0	36
49	PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Tahun Buku 2013 dan 2014 (semester I)	13	38	36	2	0	0	38
50	LKPD TA 2014	15	40	17	23	0	0	40
51	Kinerja Akrua TA 2014-2015 *)	5	11	2	5	4	0	11
52	Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2014-2015	7	33	0	0	33	0	33
53	Manajemen Aset TA 2014-2015 (s.d. Triwulan III)	11	53	12	41	0	0	53
54	Kinerja atas Efisiensi Bank & Efektivitas Program Bank pada PT. BPD Jatim Tbk. Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015	26	59	58	1	0	0	59
55	LKPD TA 2015	9	28	13	15	0	0	28
56	Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 - 2016	10	19	2	17	0	0	19
57	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 - 2016	9	36	4	31	1	0	36
58	Belanja Bidang Kesehatan RSUD Dr Soetomo TA 2015 dan 2016 (s.d Oktober)	8	31	26	5	0	0	31
59	Kegiatan Operasional dan Investasi PT Jatim Grha Utama dan Anak Perusahaan TB 2014 dan Semester I 2015	12	35	12	14	9	0	35
60	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT Petrogas Jatim Utama dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya	5	6	3	3	0	0	6
61	LKPD TA 2016	20	53	20	31	2	0	53
62	Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya	10	22	3	19	0	0	22
63	LKPD TA 2017	16	22	8	4	10	0	22
64	LKPD TA 2018							
	Jumlah	702	1403	1021	310	72	0	1403
	Prosentase			72.77%	22.10%	5.13%	0.00%	

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap OPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	NO DAN TGL LHP	JUMLAH				
			TMN	RKM	S	DP	B
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR	743/26/060.3/2019 04 Januari 2019	9	11	0	0	11
2	UPT. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KEDIRI	761/121/060.5/2019 22 Januari 2019	9	14	0	0	14
3	UPT. PSDA PAMEKASAN	761/260/060.3/2019 12 Maret 2019	8	10	0	0	10
4.	UPT. PSDA MADIUN	761/544/060.2/2019 19 Maret 2019	19	30	0	0	30
5.	DINAS PERKEBUNAN PROV. JATIM	525/611/060.2/2019 02 April 2019	11	11	0	0	11
6.	RSUD. Dr. SAIFUL ANWAR MALANG	740/23/060.3/2019 04 Januari 2019	6	9	0	0	9
7.	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	760/817/060.2/2019 06 Mei 2019	22	50	0	0	50
8.	UPT. PSDA BOJONEGORO	761/610/060.2/2019 02 April 2019	10	10	0	0	10
9.	UPT. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI BONDOWOSO	761/498/060.3/2019 15 Maret 2019	5	5	0	0	5
10.	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	797/169/060.5/2019 01 Pebruari 2019	7	10	0	0	10
11.	DISPERINDAG PROVINSI JAWA TIMUR	750/24/060.5/2019 04 Januari 2019	8	14	0	0	14
12.	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR	760/695/060.2/2019 16 April 2019	12	15	0	0	15
13.	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	746/489/060.3/2019 14 Maret 2019	7	7	0	0	7
14.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. JATIM	560/27/060.3/2019 04 Januari 2019	9	12	0	0	12
15.	DISKOMINFO PROVINSI JAWA TIMUR	750/21/060.4/2019 04 Januari 2019	17	18	0	0	18
16.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	523/143/060.2/2019 12 Pebruari 2019	23	34	0	0	34

17.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. JATIM	704/22/060.4/2019 04 Januari 2019	15	20	0	0	20
18.	UPT. PSDA MALANG	760/263/060.5/2019 11 Pebruari 2019	8	18	0	0	18
	JUMLAH		205	298	0	0	298

Keterangan status: persentase

S : Selesai 0%

DP : Dalam Proses 0%

B : Belum 100%





BAB IV
HASIL PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEMESTER I TAHUN 2019

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
1	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B 78/kemenset/D-2DM.05/1/2019 Tgl 9 Januari 2019	Pengaduan Masyarakat an. sdr. Herismini kepada Kepala Dinas PU	Surat Pelimpahan	
2	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B 56/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 8 Januari 2019	Pengaduan Masyarakat an. Maskoer Dimyati kepada Bupati Gresik	Surat Pelimpahan	
3	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -95/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 11 Januari 2019	Pengaduan Masyarakat an. Toha kepada Bupati Sidoarjo	Surat Pelimpahan	
4	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -254/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 18 Januari 2019	Permohonan Bantuan kepada Bupati Kediri	Surat Pelimpahan	
5	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -254/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 23 Januari 2019	Permohonan Bantuan an. Supartin kepada Bupati Lamongan	Surat Pelimpahan	
6	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -328/kemenset/D-2DM.05/1/2019 Tgl 23 Januari 2019	Pengaduan Masyarakat an. Santoso kepada Walikota Surabaya	Surat Pelimpahan	
7	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -455/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 31 Januari 2019	Permohonan Bantuan Tarif Listrik Sdr. Piona Estelina Sitompul kepada Walikota Malang	Surat Pelimpahan	
8	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -460/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 31 Januari 2019	Permohonan Bantuan Biaya Hidup kepada Bupati Probolinggo	Surat Pelimpahan	
9	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -450/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 31 Januari 2019	Permohonan Bantuan Sdr. Rudiana kepada Walikota Surabaya	Surat Pelimpahan	

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
10	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -460/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 30 Januari 2019	Permohonan Bantuan Modal Usaha kepada Kepala Dinas Koperasi	Surat Pelimpahan	
11	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -460/kemenset/D-2DM.02/1/2019 Tgl 31 Januari 2019	Pengaduan Masyarakat Sdri. Idha Kariyati kepada Kepala Dinas Kependudukan Tuban	Surat Pelimpahan	
12	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -1150/kemenset/D-2DM.05/03/2019 Tgl 19 Maret 2019	Pengaduan Masyarakat dari Kamat kepada Bupati Mojokerto	Surat Pelimpahan	
13	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -977/kemenset/D-2DM.02/03/2019 Tgl 11 Maret 2019	Permohonan Bantuan kepada Bupati Mojokerto	Surat Pelimpahan	
14	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -908/kemenset/D-2DM.10/03/2019 Tgl 5 Maret 2019	Pengaduan Masyarakat kepada Bupati Sampang	Surat Pelimpahan	
15	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Masyarakat B -1003/kemenset/D-2DM.03/03/2019 Tgl 11 Maret 2019	Permohonan Bantuan kepada Gubernur Jawa Timur	Surat Pelimpahan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	
16	Kementerian Sekretariat Negara RI B -1200/kemenset/D-2DM.03/03/2019 Tgl 22 April 2019	Pengaduan Masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Situbondo tentang Pungutan Liar Oleh Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus Situbondo	Surat Pelimpahan	
17	Kementerian Sekretariat Negara RI Tgl 26 April 2019	Permohonan Bantuan kepada Walikota Surabaya	Surat Pelimpahan	
18	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RB RI B. 53/M.PP.03/2019 Tgl 12 Maret 2019	Disp. Bp. Asisten Adm. Umum ttg Tindak Lanjut Pemantauan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Surat Diarsipkan dan Di Tindak Lanjuti oleh Provinsi	
19	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RB RI B. 1393/kemenset/D/2/DM.05/04/2019 Tgl 5 Mei 2019	Pengaduan Masyarakat an. Supriyanto kepada Bupati Blitar	Surat Pelimpahan	
20	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1489/kemenset/D/2/DM.04/04/2019 Tgl 11 Mei 2019	Pengaduan Masyarakat an. Anwar Riyadi kepada Bupati Jember	Surat Pelimpahan	
21	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1482/kemenset/D/2/DM.05/04/2019 Tgl 11 Mei 2019	Pengaduan Masyarakat an. Asmono kepada Bupati Blitar	Surat Pelimpahan	

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
22	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1497/kemenset/D/2/DM.05/04/2019 Tgl 11 Mei 2019	Pengaduan Masyarakat an. Abdul Habibullah kepada Dinas Tenaga Kerja	Surat Pelimpahan	
23	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1497/kemenset/D/2/DM.05/04/2019 Tgl 11 Mei 2019	Pengaduan Masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Tuban	Surat Pelimpahan	
24	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1497/kemenset/D/2/DM.05/04/2019 Tgl 11 Mei 2019	Penyampaian Problema Industri di Jawa Timur kepada Gubernur Jatim	Surat Pelimpahan	
25	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 51/M.P.P.03/2019 Tgl 11 Mei 2019	Disp. Bp. Sekretaris Daerah mengenai Tindak Lanjut Pemantauan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berdasarkan Platform Aplikasi Laporan	Surat Pelimpahan	
26	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 650/kemensetneg/ D2/DM.03/04 2019 Tgl 22 April 2019	Pengaduan Masyarakat kepada Inspektorat Probolinggo	Surat Pelimpahan	
27	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1762/kemendagri/ D2/DM.02/04 2019 Tgl 30 April 2019	Permohonan Bantuan kepada Bupati Sidoarjo	Surat Pelimpahan	
28	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1617/kemensetneg/ D2/DM.02/04 2019 Tgl 16 April 2019	Permohonan Bantuan kepada Bupati Blitar	Surat Pelimpahan	
29	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1702/kemensetneg/ D2/DM.02/04 2019 Tgl 1 April 2019	Pengaduan Masyarakat kepada Walikota Surabaya	Surat Pelimpahan	
30	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1723/kemensetneg/ D2/DM.02/04 2019 Tgl 30 April 2019	Permohonan Bantuan kepada Bupati Sidoarjo	Surat Pelimpahan	
31	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1733/kemensetneg/ D2/DM.02/04 2019 Tgl 30 April 2019	Permohonan Bantuan kepada Bupati Ngawi	Surat Pelimpahan	
32	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1945/kemensetneg/ D2/DM.02/05 2019 Tgl 16 Mei 2019	Permohonan Bantuan kepada Bupati Ngawi	Surat Pelimpahan	
33	Kementerian Sekretariat Negara RI B. 1774/kemensetneg/ D2/DM.02/05 2019 Tgl 6 Mei 2019	Permohonan Bantuan kepada Walikota Surabaya	Surat Pelimpahan	

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
34	Kementerian Sekretariat Negara RI	Pengaduan Masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Kediri	Surat Pelimpahan	
	B. 1782/kemensetneg/ D2/DM.03/05 2019			
	Tgl 6 Mei 2019			
35	Kementerian Sekretariat Negara RI	Pengaduan Masyarakat kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan	Surat Pelimpahan	
	B. 1879/kemensetneg/ D2/DM.03/05 2019			
	Tgl 13 Mei 2019			
36	Kementerian Sekretariat Negara RI	Permohonan Bantuan kepada Walikota Surabaya	Surat Pelimpahan	
	B. 1808/kemensetneg/ D2/DM.03/05 2019			
	Tgl 13 Mei 2019			
37	Kementerian Sekretariat Negara RI	Ucapan Terima Kasih kepada Inspektur Jawa Timur	Surat Diarsipkan	
	B. 1858/kemensetneg/ D2/DM.03/05 2019			
	Tgl 24 Juni 2019			
38	Kementerian Sekretariat Negara RI	Permohonan Bantuan kepada Bupati Jember	Surat Pelimpahan	
	B. 1753/kemensetneg/ D2/DM.02/04 2019			
	Tgl 30 April 2019			
39	Kementerian Sekretariat Negara RI	Permohonan Bantuan kepada Walikota Madiun	Surat Pelimpahan	
	B. 1753/kemensetneg/ D2/DM.02/04 2019			
	Tgl 16 April 2019			
40	Kementerian Sekretariat Negara RI	Permohonan Bantuan kepada Walikota Surabaya	Surat Pelimpahan	
	B. 2045/kemensetneg/ D2/DM.02/05 2019			
	Tgl 31 Mei 2019			
41	Kementerian Sekretariat Negara RI	Permohonan Bantuan	Surat Pelimpahan	
	B. 2053/kemensetneg/ D2/DM.04/05 2019			
	Tgl 31 Mei 2019			
42	Kementerian Sekretariat Negara RI	Pengaduan Masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro	Surat Pelimpahan	
	B. 2053/kemensetneg/ D2/DM.04/05 2019			
	Tgl 31 Mei 2019			
43	Kementerian Sekretariat Negara RI	Permohonan Bantuan kepada Bupati Banyuwangi	Surat Pelimpahan	
	B. 2101/kemensetneg/ D2/DM.02/06 2019			
	Tgl 12 Mei 2019			
44	Kementerian Sekretariat Negara RI	Pengaduan Masyarakat kepada Bupati Gresik	Surat Pelimpahan	
	B. 2160/kemensetneg/ D2/DM.05/06 2019			
	Tgl 18 Juni 2019			
45	Kementerian Sekretariat Negara RI	Pengaduan Masyarakat an. Ratna Endang kepada Walikota Surabaya	Surat Pelimpahan	
	B. 2178/kemensetneg/ D2/DM.06/06 2019			
	Tgl 18 Juni 2019			

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
46	Kementerian Sekretariat Negara RI	Pengaduan Masyarakat kepada Bupati Tulungagung	Surat Pelimpahan	
	B. 2245/kemensetneg/ D2/DM.05/06 2019			
	25 Juni 2019			
47	Harijatin	Pengaduan Masyarakat an. Harijatin kepada Inspektorat Jatim	Dibuatkan Surat Panggilan untuk dilimpahkan	
	Tgl 7 Januari 2019			
	TU 210			
48	Abhimayu ud	Pengaduan Masyarakat Pedanaan Benih Nilam	Surat Pelimpahan	
	Tgl 4 Januari 2019			
	TU100119			
49	Warga Perumahan Sumpat Gresik	Usulan Pembangunan PSU Perumahan Sumpat Asri Gresik	Surat Pelimpahan	
	Tgl 6 Januari 2019			
50	PT Sakur Agung Perkasa	Tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Pembongkaran	Surat Pelimpahan	
	Tgl 12 Januari 2019			
	TU 18119			
51	Kantor Advokat Achmad Boesiri & Rekan Malang	Disp. Bp. Asisten Adm. Umum ttg Laporan Tentang Penelantaran dan Tidak Memberi Nafkah	Surat Pelimpahan	
	Tgl 15 Januari 2019			
	TU 220119			
52	Ahmad Saikhu, S.Sos, M.Si	Disp. Asisten Umum ttg Pengajuan Keberatan an. Surat Keputusan Bupati Blitar No. 862/183/409.209.205.3/SK/2018		
	Tgl 21 Januari 2019			
	Tu 2			
53	Media Online	Disp. Bp. Sekretaris Daerah Jatim ttg Konfirmasi Berita Pra Tayang	Surat Pelimpahan Pada OPD Terkait	
	Tgl 21 Januari 2019			
	G009/Pelita/Konfirmasi/XII/201			
54	Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim)	Disp. Bp. Sekretaris Daerah Jatim tentang Keberatan Permohonan Informasi	Surat Diarsipkan	
	Tgl 8 Januari 2019			
	01 Jaka Jatim/KPIP/I 2019			
55	Dwi Harianti, SH	Permohonan untuk memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Sisa Sempadan Sungai Kali Wonokromo yang terletak di Medokan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 4 Februari 2019			
	011/DHA/II/2019/Sby			
56	Iwan Toro	Pengaduan Masyarakat an. Sdr Iwan Toro	Surat Diarsipkan	
	Tgl 3 Februari 2019			
	TU 06219			
57	Amar law abdul Malik Azis	Klarifikasi terkait sismiop/Basis/Basis Data atas jawaban Surat Jawaban Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	Surat Pelimpahan ke Pemerintahan Kabupaten Gresik	
	041-01-2019			
	001/AMR- PPID/II-2019			
58	Scw. Indonesia	Klarifikasi Penetapan Air Permukaan Ke - 2	Surat Pelimpahan	

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
59	Bambang Pambudi	Permohonan Adanya Pendataan dan Pengecekan Lapangan Atas Luas Tanah	Surat Pelimpahan	
	Tgl 11 Februari 2019			
	001/SP.Monitoring/wqr/II/2019			
60	Lembaga Sosial Masyarakat Bintang Nusantara	Keberatan kepada Bupati Kediri	Surat Pelimpahan	
	Tgl 12 Februari 2019			
61	Imam Mulyadi, AMR, SE	Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS oleh Heri Santoso kepada BKN II Surabaya	Surat Pelimpahan	
	Tgl 15 Februari 2019			
62	LSM Gerpas	Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Terhadap Pelaksana Kegiatan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)	Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan	
	Tgl 25 Februari 2019			
	010/LSM-Gerpas/II/2019			
63	Sri Haryanti	Disp. Bp. Asisten Adm. Umum tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Antara Zamroni dengan Sri Hariyanti	Surat Pelimpahan	
	Desa Sawo Ponorogo			
	01-02/SK/2019			
64	Imam Mulyadi, AMR, SE	Disp. Bp. Asisten Adm. Umum tentang Laporan Pengaduan Pelanggaran Disiplin PNS	Surat Pelimpahan	
	Tgl 5 Februari 2019			
	270219			
65	DPN-LPPNRI	Surat Tugas Khusus	Koordinasi dengan Pemerintah Karena Pungli Klinik Desa	
	Tgl 22 Januari 2019			
	01-502/stk.inv/lppnri-dpn/1/11			
66	M.Mawar Riyadi Jember	Disp. Bp. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentang Pengaduan Pelecehan Seksual	Surat Pelimpahan	
	Tgl 13 Januari 2019			
	270219			
67	Komite Penegak Perjuangan Rakyat Kediri	Disp. Bp. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentang Masukan dan Mohon Adanya Pengawasan Pencegahan Kemungkinan Terjadi Kebocoran Soal Ujian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri	Surat Pelimpahan	
	Tgl 21 Februari 2019			
	028/MAS/21/KKR/II/2019			
68	Oktovalia Deliyanti	Mengadukan Suami Tidak Segera Mendaftarkan Perceraian ke Pengadilan Negeri Agama	Surat Pelimpahan ke Dinas Peternakan	
	Tgl 12 Maret 2019			
	120319			
69	Rini Martinni	Pengaduan Masyarakat an. Rini Martini, S.Psi	Surat Pelimpahan	
	Tgl 26 Februari 2019			
	40319			

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
70	Wakil Masyarakat Desa Tiripan	Laporan Masyarakat Desa Tiripan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 20 Januari 2019			
	TU 220119			
71	Perumahan Griya Karya Sumpat Asri	Pengaduan Masyarakat	Surat Diarsipkan	
	Tgl 21 Maret 2019			
	05-GKSA/III/2019			
72	Hari Praptoyo	Disp. Asisten tentang Pengajuan Keberatan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 10 Januari 2019			
	TU 302			
73	Ardo Teknik	Klarifikasi	Surat Pelimpahan	
	Tgl 25 Februari 2019			
	76/K1r.Lp/JH/2019			
74	Mergosari Singgahan	Permohonan	Surat Pelimpahan ke Bupati Tuban	
	Tgl 19 Maret 2019			
	BPD Mergosari/2019			
75	Solikhah	Permohonan Perlindungan Hukum	Surat Pelimpahan ke Bupati Sidoarjo	
	Tgl 1 April 2019			
	5/Tnah.04.2019			
76	Rochmadi Sularso, S.Psi	Disp. Bp. Asisten Umum tentang Permohonan Rekomendasi dan Tindakan Administrasi	Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan	
	Tgl 5 April 2019			
	01/SMK/IV/2019			
77	PT. Bayang Bungo	Pengaduan Atas Penjelasan dan Jawaban Sanggahan Pokja 147	Surat Pelimpahan ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
	Tgl 12 April 2019			
	001/BB-Sanggahan/IV/2019			
78	Holik	Pengaduan Masyarakat an. Kholik	Surat Diarsipkan	
	Tgl 12 April 2019			
	sprin/32/III/HUK.6.6/2019			
79	Rochmadi Sularso, S.Psi	Disp. Bp. Asisten Adm. Umum tentang Permohonan Tindak Admin pada Bupati	Surat Diarsipkan	
	Tgl 8 April 2019			
	220119			
80	Karyawan UPT PMP2KP Pagesangan Surabaya	Disp. Bp. Asisten Adm. Umum tentang Menyampaikan Laporan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 21 Maret 2019			
	30042019			
81	Andriyanto - Perwakilan Warga Apartemen Puncak Permai	Disp. Bp. Sekda tentang Tanggapan dan Permintaan Penjelasan dari PT. Selaras Inti Surabaya	Surat Pelimpahan	
	Tgl 6 Mei 2019			
	0112/PWAPP/IV/2019			
82	Joko Wahyudianto - Pacitan	Pengaduan Masyarakat	Surat Pelimpahan	
	Tgl 29 April 2019			
	60519			
83	Sri Haryanti	Permohonan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga antara Zamroni dan Sri Hariyanti	Surat Pelimpahan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	
	Tgl 6 Mei 2019			
	01/04/SK/2019			

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
84	Dr. HM. Shoinuddin Umar, SH, M.Si	Permohonan Menghadap Kepada Gubernur Jawa Timur	Surat Pelimpahan	
	Tgl 4 Mei 2019			
	012/PKD-AV/2019			
85	Perhutani Kesatuan Madura	Pengaduan Masyarakat an. Awasi	Surat Diarsipkan	
	Tgl 6 Mei 2019			
	263/044/kam/mdr/drive jatim			
86	Edi Suprpto	Disp. Bp. Asisten Adm. Umum tentang Peringatan Ketiga Pencegahan Kerugian Keuangan Negara dari Tumpang Tindih Anggaran Kegiatan Festival Banyuwangi	Surat Pelimpahan	
	Tgl 7 Mei 2019			
	009/SK/27/V/2019			
87	Alian Pengemudi Mobil	Permohonan Penghapusan Sewa Tahunan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 22 April 2019			
	014/APMPU/IV/2019			
88	Akmad	Laporan atau Pengaduan Adanya Tindak Disiplin Oleh Drs. H. Saiful Bahri, M.Si Sumenep dan saat ini asisten Pemerintahan Kabupaten Sumenep	Surat Pelimpahan	
	Tgl 16 Mei 2019			
	12/30/2448			
89	LSM Grasi	Konfirmasi Dugaan Persengkokolan Tender pada Pekerjaan Pengadaan Seragam Khusus di CV. Maju Jaya dan Nomor SPK 027.08.124/101.2/2017 tertanggal 07.07.2017	Surat Pelimpahan	
	Tgl 20 Mei 2019			
	066/LSM-Grasi/V/2019			
90	Forum Komunikasi Ormas	Disp. Bp. Sekretaris Daerah tentang Permohonan Audiensi dan Evaluasi Kinerja SKPD	Surat Pelimpahan	
	Tgl 9 Mei 2019			
	01/sekber/for/V/2019			
91	LIRA	Pengaduan Masyarakat tentang Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo	Surat Pelimpahan	
	Tgl 29 Mei 2019			
	004/PT/DPDLIRA Prob/2017			
92	Nanda Dityawan Sidosremo	Pengaduan Masyarakat tentang Larangan Sholat di Mushola SMKN 5 Surabaya	Surat Pelimpahan	
	Tgl 3 Mei 2019			
	TU 180119			
93	Imam Mulyadi, AMR, SE	Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS oleh Heri Santoso, S.Sos, SAP Staf BKD Nganjuk	Surat Diarsipkan	
	Tgl 15 Juni 2019			
94	PT. Cahaya Adin Abadi	Disp. Asisten Perekonomian dan Pembangunan tentang Surat Somasi	Surat Diarsipkan	
	Tgl 19 Juni 2019			
	004/PT.CAA/MS-H.SK/V/2019			
95	Elpamas Jember	Pengaduan Masyarakat	Surat Pelimpahan	
	Tgl 6 Mei 2019			
	027.LPM.00.0519			

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
96	Suhartono - Madiun	Pengaduan Masyarakat ke BKD	Surat Pelimpahan	
	Tgl 24 Juni 2019			
	10719			
97	Kantor Hukum	Pengaduan ke 2 Pemasangan Aliran Listrik Tanpa Izin Pemilik Tanah	Surat Pelimpahan	
	Tgl 11 Juni 2019			
	99.2.10/SY/VI/2019			
98	Sri Hariyanti	Permohonan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga antara Zamroni dan Sri Hariyanti	Surat Pelimpahan	
	Tgl 1 Juni 2019			
	01.06/2019			
99	Masyarakat Desa Kecamatan Kwanyar	Pengaduan Masyarakat	Surat Pelimpahan	
	Tgl 12 Juli 2019			
	7/15/2019			
100	Poniman	Memanipulasi Dokumen	Surat Pelimpahan	
	Tgl 8 Juli 2019			
	15/2019			
101	Pos Bantuan Hukum Advokat	Laporan Penanganan Pelanggaran Ketenagakerjaan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 17 Juli 2019			
	008/ci.01/posbakumadin.jbg/VI			
102	Kementrian Dalam Negeri	Adanya Dugaan Upati Sidoarjo Menerbitkan Izin Lokasi a. PT. Makmur Berkah Amanda	Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan	
	X.356/022/5			
103	Bupati Banyuwangi	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Surat Diarsipkan	
	Tgl 7 Januari 2019			
	130/32/429.012/2018			
104	Kantor Hukum Sadewa & Rekan	Pengaduan Masyarakat an. Bremahardika Dias Sadewa, SH	Surat Pelimpahan	
	Tgl 16 Januari 2019			
	TU 160119			
105	Inspektorat kab Tenggalak	Permohonan Klarifikasi	Surat Permintaan Data yang Dimaksud ke Dinas Perhubungan	
	Tgl 14 Januari 2019			
	700/138/406.008/2019			
106	Inspektorat kab Sidoarjo	Laporan Hasil Pengawasan Bulan Desember 2018		
	Tgl 7 Januari 2019			
	x.700./04/438.4/2019			
107	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Pengaduan Terhadap Sdr. Ir. Satoto Berbudi M.Si	Surat Konfirmasi ke Dinas Pertanian	
	Tgl 11 Desember 2018			
108	Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Prov. Jatim	Disp. Bapak Sekretaris Daerah Jawa Timur tentang Tindak Lanjut Laporan Kerusakan Lingkungan & Tidak Taat Pajak	Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan	
	Tgl 10 Januari 2019			
	545/108/124.2/2018			
109	Bupati Malang	Hasil Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat Desa Langlang Kecamatan Singosari	Surat Diarsipkan	
	Tgl 30 Januari 2019			
	x/700/625/35.07.050/2019			
110	Inspektorat Kab Jombang	Laporan Hasil Klarifikasi Pengaduan Masyarakat	Surat Diarsipkan	
	Tgl 6 Februari 2019			
	700/114/415.15/2019			

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
111	Kepala Biro Gubernur Jawa Timur	Permohonan Perhatian dan Keberadaan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 15 Februari 2019			
	181.4/2773/013.2/2019			
112	Biro Hukum	Permohonan Banding Administratif Kepegawaian	Surat Diarsipkan	
	Tgl 6 Maret 2019			
	181.4/895/013.2/2019			
113	Sekretariat Daerah Jawa Timur	Laporan Pengaduan Formasta	Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan	
114	Irjen Kelautan Perikanan	Disp. Asisten Perekonomian dan Pembangunan tentang Klarifikasi Masalah Tanah	Surat Tindak Lanjut ke DKP	
	Tgl 1 Februari 2019			
	1252/Itj.5/Pl.210/II/2019			
115	Sekretariat Daerah Kab Bojonegoro	Tindak Lanjut Bantuan	Surat Diarsipkan	
	Tgl 18 Maret 2019			
116	Sekda Kab Ponorogo	Disp. Sistem Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pengaduan Masyarakat tentang Pembongkaran Pasar Eks Ponorogo	Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan	
	Tgl 9 Februari 2019			
	709/214/405.15/2019			
117	Pegawai RS. Dr. Soedono	Pengaduan Masyarakat	Surat Diarsipkan	
	Tgl 5 Maret 2019			
	180319			
118	Sekretariat Daerah Mojokerto	LHP Pengaduan Masyarakat an. Kuswandi (Wakil Ketua BPD)	Surat Sudah Diarsipkan	
	x.700.03/303/416-2019			
119	Bupati Lamongan	Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat an. Sdr. Supartin Kepala Desa di Kec. Kalitengah Kab Lamongan	Surat Pelimpahan di jadikan satu dengan bahan laporan	
	Tgl 28 Maret 2019			
	x.700/413.201/2019			
120	Marsulam Nganjuk	Pengaduan a.n Mursam Nganjuk	Surat Pelimpahan ke Bupati Nganjuk	
	Tgl 5 April 2019			
	50419			
121	Farda Isti Halimah	Pengaduan Masyarakat A.n Farda Isti Halimah Lumajang	Surat Pelimpahan ke Dishub Provinsi Jawa Timur	
	Tgl 27 Maret 2019			
	800/9584/202.5/2019			
122	Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim	Tindak Lanjut Pengaduan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 29 Maret 2019			
	800/9584/202.5/2019			
123	Inspektorat Kab Kediri	Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. Suprin Nurhadi Guru Pertama pada SDN Karang Rejo 2 Kec. Gumukmas	Surat Diarsipkan dan di kirim ke Mendagri Setneg	
	Tgl 2 April 2019			
	x.780/3064/35.09.410/2019			
124	Inspektorat Prov. Jatim	Disp. Bapak Sekda tentang Tindak Lanjut atas Surat Pengaduan Masyarakat	Surat Diarsipkan	
	Tgl 18 April 2019			
	522/1079/123.2/2019			

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
125	Kepala dinas Kehutanan Prov. Jatim Tgl 18 April 2019 522/1079/123.2/2019	Data Kawasan di Desa Kaliayar Kab Sumenep	Surat Diarsipkan	
126	Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tgl 29 April 2019 4837/F3/Rrhs/TU/2019	Rekomendasi	Surat Pelimpahan	
127	Inspektorat Kota Malang Tgl 2 Mei 2019 700/360/353.73.412	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Surat Diarsipkan	
128	Sekretariat Daerah Kab Kediri	Pengaduan Sdr. Drs. Muliono Perihal Dugaan Penghambatan Proses Usulan Kenaikan Pangkat	Surat Pelimpahan	
129	Sekretaris Daerah Pemerintah Prov. Jatim Tgl 9 Mei 2019 045.2/9935/032.1/2019	Melaporkan Perselingkuhan	Surat Diarsipkan	
130	Inspektorat Kota Malang Tgl 13 Mei 2019 700/402/35.73.401/2019	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Melalui Pos el.Ew8377307@gmail.com		
131	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim Tgl 10 Mei 2019 602.1/868/103/2019	Penyelesaian Atas Pengaduan Masyarakat pada Paket Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan Bts. Sampang - Ketapang	Surat Diarsipkan	
132	Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat Tgl 11 Mei 2019 002/PT/DPD LIRA Prov/ V 2019	Penyampaian Temuan Terkait Pembangunan dan Penenggelaman Rumah Iklan di Kab Banyuwangi	Surat Pelimpahan	
133	Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat Tgl 11 Mei 2019 003/PT/DPD L	Pelaporan Penyaluran BBM Solar Industri di Wilayah PPI Manyangan PPI Kota Probolinggo Jatim yang Diduga Ilegal	Surat Diarsipkan	
134	Sekretariat Daerah Kab Kediri Tgl 3 Mei 2019 700/978/418.11/2019	Disp. Bapak Asisten Umum Tentang Pengaduan Sdr. Drs. Mulyono	Surat Diarsipkan	
135	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Prov Jatim Tgl 14 Mei 2019 412/5131/112.3/2019	Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2018 Pokja Pengaduan Masyarakat TKPK Prov Jatim	Surat Diarsipkan	
136	Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur	Disp. Bapak Asisten Perekonomian & Pembangunan Tentang Klasifikasi II (Dua) Dugaan Pelanggaran Hukum UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Surat Pelimpahan	

NO.	NO. & TGL SURAT	ISI MATERI SURAT	TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	PENJELASAN MATERI SURAT
137	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim	Disp. Bapak Sekda Jawa Timur Tentang Penjelasan Atas Pengaduan Masyarakat Pada Paket Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan Bts Sampang - Katapang	Surat Diarsipkan	
	Tgl 10 Mei 2019			
	602.1.868/103/2019			
138	RSUD Dr. Soedono Madiun	Tanggapan Permintaan Konfirmasi dan Informasi	Surat Diarsipkan	
	Tgl 27 Mei 2019			
	445/16.153.303/2019			
139	Sekretariat Daerah Prov Jatim	Pengaduan Masyarakat	Surat Diarsipkan dan Dijadikan Satu Dengan Surat Pelimpahan	
	Tgl 27 Mei 2019			
	539/1115/021.2/2019			
140	Inspektorat Kab Jember	Hasil Pemeriksaan Terhadap Sdr. Supri Nurhadi, Spd Kec. Gumukmas	Surat Diarsipkan	
	Tgl 14 Juni 2019			
	x.780/507/35.09.410/2019			
141	Inspektorat Kab Jember	Pengaduan Sdr. Edi Suprpto	Surat Diarsipkan	
	Tgl 14 Juni 2019			
	x.780/507/35.09.410/2019			
142	Dinas Tenaga Kerja Pekerjaan Umum	LHP Pelanggaran Disiplin PNS an. Sdr Mundhier	Surat Diarsipkan	
	Tgl 21 Juni 2019			
	856/515/104.6.02.2019			
143	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persoalan Hukum dan Implikasinya, Keputusan RUPSLB PT BANK JATIM	Surat Diarsipkan dan ditunggu rekomendasi selanjutnya	
	Tgl 8 Juli 2019			
	15/7/209			
144	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Menyeluruh OPD Dinas Kelautan	Surat Pelimpahan	
	Tgl 5 Juli 2019			
145	Sistem Perekonomian dan Pembangunan	Disp. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari DPD Asosiasi Kontraktor Nasional Mengenai Surat Keberatan	Menunggu Perkembangan	
	Tgl 24 Juni 2019			
	019/SKP/VI/2019			
146	Inspektorat Kab Kediri	Hasil Telaah Informasi Data Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bos Pada SMK Pemuda Papar Tahun Ajaran 2016/2017	Surat Pelimpahan	
	Tgl 23 Juli 2019			
	700/1474/418.11/2019			
147	Inspektorat kab Sidoarjo	Pengaduan Masyarakat Oleh CV. Karya	Surat Pelimpahan	
	Tgl 22 Juli 2019			
	700/104/438.4/2019			

Satuan Kerja: INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR



BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Salah satu agenda Pembangunan Nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan salah satu dari 9 (sembilan) agenda Arah Kebijakan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah revitalisasi proses desentralisasi (otonomi daerah) melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang merupakan sub agenda penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab melalui salah satu program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah.

Pelaksanaan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah, Inspektorat Provinsi sebagai salah satu bagian dari manajemen Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ikut bertanggungjawab dalam pencapaian agenda Pembangunan Nasional khususnya yang merupakan ruang lingkup dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun uraian tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Semester I Tahun 2019 adalah:

- a. Untuk audit kinerja dengan jenis temuan terbanyak dan rekomendasi dominan yaitu:
 - Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan sub temuan Administrasi sebanyak 107 temuan atau 52% dari jumlah keseluruhan temuan.
 - Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sub temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern sebanyak 38 temuan atau 19% dari jumlah keseluruhan temuan.
 - Temuan 3E (Tidak efektif, efisien dan ekonomis) sebanyak 26 temuan atau 13% dari jumlah keseluruhan temuan.
- b. Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan laporan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Provinsi, pelimpahan hasil APIP, pelimpahan dari KPK serta pemberitaan yang ada di media massa.

- c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum LKPD tersebut diaudit oleh BPK RI.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama Semester I Tahun 2019 dilakukan atas 67 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- e. Kegiatan pengawasan lainnya yaitu pelaksanaan sosialisasi EKPPD atas 38 Kab/Kota se-Jawa Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi dan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda.
- f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dari 702 temuan dengan 1403 saran rekomendasi, 1021 rekomendasi (72,77%) dengan status TS (telah selesai), 310 rekomendasi (22,10%) dengan status TB (belum selesai), dan 72 rekomendasi (5,13%) dengan status BT (belum ditindaklanjuti).
- g. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Semester I Tahun 2019, masih belum dapat ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 298 rekomendasi.
- h. Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 147 yang masuk ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, 103 kasus sudah dilimpahkan kepada OPD terkait, 41 kasus diarsipkan dan menunggu rekomendasi lanjutan, dan 3 kasus sudah ditindaklanjuti Inspektorat Provinsi.
- i. Pelaksanaan Program Klinik “KADES LAWAS” di 4 kabupaten, yaitu di Kabupaten Kediri, Jember, Lamongan, dan Jombang.

Sedangkan adanya ketidaksesuaian program pengawasan yang direncanakan dengan realisasi PKPT Semester I Tahun 2019 dikarenakan jumlah personil/Auditor yang belum proporsional dibanding jumlah OPD yang menjadi obyek pemeriksaan, disamping juga adanya penugasan yang bersifat prioritas dan strategis pada tahun 2019 antara lain :

- Evaluasi atas SPJ pada masing-masing OPD;
- Pendampingan kepada OPD dalam rangka pemeriksaan BPK RI;
- Pemeriksaan khusus terkait program bansos dan hibah pada Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
- Evaluasi SAKIP-LAKIP pada SKPD dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Pelaksanaan Program Klinik “KADES LAWAS” Kawal Desa melalui Pengawasan
- Reviu RKA Semester I Tahun 2019 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Kurang sinkronnya jadwal pemeriksaan oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI dengan jadwal PKPT Inspektorat, sehingga diperlukan penyesuaian jadwal.

B. Hambatan

Beberapa permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan pengawasan antara lain :

- Sumber Daya Aparat Pengawasan fungsional terbatas dan belum ada penambahan yang signifikan dan proporsional dengan jumlah OPD selaku obyek pemeriksaan, sedangkan SDM yang ada lebih banyak merupakan tenaga administratif yang masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi tenaga fungsional (JFA/JFP2UPD) yang kompeten di bidangnya.
- Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan (Auditee) sehingga masih dijumpai adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- Jadwal pemeriksaan/pengawasan oleh APIP (Itjen Kementerian dan Itprov) beberapa kali bersamaan/berdekatan waktunya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sehingga terkesan bertubi-tubi/tumpang tindih yang menimbulkan keluhan dari Auditee.
- Masih adanya kasus-kasus baik pelimpahan dari Instansi pusat maupun pengaduan masyarakat langsung yang belum dapat ditindaklanjuti karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap/jelas, disamping itu juga banyak surat pengaduan/kasus yang tembusannya dikirim ke beberapa lembaga pengawasan fungsional (Itjen Kementerian, BPKP, BPK), lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian), KPK dan MENPAN yang masih diperlukan koordinasi penanganan lebih lanjut.

C. Rekomendasi

Terkait dengan adanya beberapa hambatan terkait pelaksanaan tupoksi, maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan:

- Perlunya peningkatan kualitas SDM APIP dengan adanya program pendidikan dan pelatihan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga kinerja APIP bisa lebih meningkat.
- Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun BPK RI dengan lebih mengintensifkan koordinasi penyelesaian tindak lanjut kepada auditee.
- Lebih meningkatkan peran APIP dalam mengawal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan merubah paradigma pengawasan yang semula bersifat represif menuju paradigma baru ke arah memberikan *consulting* dan *quality assurance*, sehingga tidak menjadikan auditee sebagai obyek audit semata namun juga sebagai mitra dalam mewujudkan tujuan organisasi/pemerintah.
- Penanganan pengaduan masyarakat/kasus belum dapat berjalan secara optimal tidak hanya disebabkan keterbatasan jumlah dan kemampuan personil (aparatur pengawasan), namun juga karena masih kurangnya koordinasi antar instansi pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya, semestinya terdapat pembagian kewenangan secara tegas atas penanganan kasus yang ada, disesuaikan dengan tupoksi dan jenis permasalahan yang ditangani sehingga penanganannya lebih efektif. Selama ini telah terjalin koordinasi penanganan kasus yang cukup baik untuk sesama APIP baik pusat maupun daerah sampai dengan pemantauan penyelesaiannya.

Sidoarjo,

2019

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HELMY PERDANA PUTERA, Drs., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630325 198903 1 013